				PIATRIK	JASI CAPAIAN PROG	KAPI/ KEGIA	TAN TANUN Z	J23				
OPD	, Dinas Dambardayaan D	oromanan Borlindungan Anak Bongon	l dalian Penduduk dan Keluarga Berencana				\vdash					
URUSA			lanan Penduduk dan Keluarga berencana				 					
UKUSA	. FFFA dall DALDOK KI	j I					1 1					Matrik 2
						KELUARA	N/OUTPUT		KEUANGAN			
							N 2023		AHUN 2023		K	ETERANGAN
NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	%	KENDALA	TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(Rp.) (9)	(Rp.)	(11)	(12)	(13)
	PROGRAM	Persentase Partisipasi perempuan	(4)	(5)	2.539.000.000		23,62%	2.539.000.000	2.523.148.504		(12)	(15)
		dalam bidang pembangunan				2,2 * * *						
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada		487.189.000	60%	60%	487.189.000	486.333.451	99,82	PUG belum terintegrasi dengan sistem perencanaan	pendampingan bagi OPD yang belum menyusun perencanaan yang responsif gender
			Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,	Provinsi Persentase perempuan yang memahami	2.051.811.000	40%	68,40	2.051.811.000	2.036.815.053	99 27	belum optimalnya pendampingan perempuan	pendampingan secara berkelanjutan bagi perempuan yang
			Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		2.031.011.000	10 70	50,10	2.031.011.000	2.030.013.033	33,27	yang sudah dilatih pemberdayaan ekonomi, sehingga motivasi dan konsistensi mereka masih rendah	sudah dilatih pemberdayaan ekonominya, agar mereka
	PROGRAM PERLINDUNGAN	Rasio korban kekerasan terhadap			1.084.336.000		4.64 per	1.084.336.000	1.043.950.572	96,28		
	PEREMPUAN	perempuan				100.000	100.000					
					197.211.000	13,89%	31,42	197.211.000	196.764.835	99,77	jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin bervariasi terutama kasus kekerasan	peningkatan kerjasama unsur pentahelix melalui pertemuan koordinasi dan Kerjasama lintas sektor untuk
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan							berbasis gender online, masih banyaknya kasus kekerasan di ruang publik terhadap perempuan dan anak	pencegahan kekerasan dan TPPO dan adanya upaya advokasi kepada anggota yang tergabung dalam PPT untuk memberikan pemahaman penanganan yang berpihak kepada korban.
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar	358.750.000	100%	100%	358.750.000	322.689.330	89,96	adanya perspektif yang berbeda dari masing- masing lembaga layanan dalam penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak	peningkatan kapasitas SDM pada Lembaga layanan terutama di kabupaten/kota untuk menangani kasus . kekerasan terhadap perempuan dan anak yang spesifik
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	528.375.000	в кеютрок	10 Kelompok	528.375.000	524.496.407	99,27		
		Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring			415.000.000	20%	20%	415.000.000	410.515.334	98,92		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yg aktif kewenangan Provinsi	415.000.000	20 kelompok	20 kelompok	415.000.000	410.515.334	98,92		
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender			112.000.000	40%	63,88%	112.000.000	111.530.884	99,58	Puspaga yang telah terbentuk belum tentu memiliki layanan bagi keluarga secara komprehensif	Sampai saat ini terdapat 22 kab/kota yang mempunyai layanan puspaga

			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	112.000.000	50%	63,88%	112.000.000	111.530.884	99,58	masih banyak konflik internal di dalam keluarga/keluarga bermasalah, utamanya pada kelompok keluarga rentan, antara lain karena banyaknya perkawinan usia anak, anak putus sekolah dan anak yang tidak dalam pengasuhan keluarga dan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT	supervisi layanan Puspaga untuk menjangkau keluarga rentan dan advokasi secara luas tentang peningkatan fungsi dan peran keluarga melalui media sosial maupun secara langsung.
		Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak			175.000.000	40%	63,88%	175.000.000	174.994.360	100		
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	175.000.000	48,57%	64,88%	175.000.000	174.994.360	100	masih banyak konflik internal di dalam keluarga/keluarga bermasalah, utaranya pada kelompok keluarga rentan, antara lain karena banyaknya perkawinan usia anak, anak putus sekolah dan anak yang tidak dalam pengasuhan keluarga dan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya adalah	supervisi layanan Puspaga untuk menjangkau keluarga rentan dan advokasi secara luas tentang peningkatan fungsi dan peran keluarga melalui media sosial maupun secara langsung.
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama			537.210.000	100%	100%	537.210.000	537.000.623	99,96	gertinggii gai alaa. Salai Salaiva agalai	provila 2023: utama 3 nindya 11 madya 15 pratama 6
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	537.210.000	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	537.210.000	537.000.623	99,96	pengisian evaluasi mandiri KLA, masih normatif atau hanya untuk pemenuhan dokumen dan belum menggambarkan kondisi di lapangan.	melakukan Penguatan peran Provinsi sebagai Tim Verifikator Administrasi KLA Provinsi sehingga dapat memberikan umpan balik evaluasi kepada kabupaten/kota
		Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)			93.000.000	25%	25%	93.000.000	91.434.500	98,32		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	93.000.000	15 Kelompok	15 Kelompok	93.000.000	91.434.500	98,32		
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio korban kekerasan terhadap anak			642.500.000	12.36 per 100.000	9.86 per 100.000	642.500.000	597.830.924	93,05		
			Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang menyusun kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak	126.875.000		25,70%	126.875.000	125.526.000		masih banyak kasus kekerasan terhadap anak pada satuan pendidikan dan pondok pesantren, Pengasuhan oleh keluarga selama ini belum responsif terhadap hak anak dan di kabupaten/kota masih minim sistem perlindungan di masyarakat	sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan unsur pentahelix, terutama dari stakeholder satuan pendidikan, Memberikan pemahaman melalui positive parenting (pengasuhan positif) bagi orang tua dar Membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang memiliki fungsi pencegahan, deteksi dini, respon cepat penanganan kasus sampai tinokat
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar	383.750.000	100	100	383.750.000	341.742.690	89,05		

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/ pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangan nya		15 Kelompok	15 Kelompok	131.875.000	130.562.234		masih banyak kasus kekerasan terhadap anak pada satuan pendidikan dan pondok pesantren, Pengasuhan oleh keluarga selama ini belum responsif terhadap hak anak dan di kabupaten/kota masih minim sistem perlindungan di masyarakat Selaman pendidikan, Memberikan pemahaman melalui positive parenting (pengasuhan positif) bagi orang tua c Membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang memiliki fungsi pencegahan, deteksi d respon cepat penanganan kasus sampai tingkat
	Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring			60.000.000	20%	20%	60.000.000	59.016.268	98,36	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga dan mitra kerja dalam rangka penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yg aktif mengikuti	50.000.000	15 Kelompok	15 Kelompok	50.000.000	49.016.268	98,03	LPA Klaten, Bapas Klaten, P2TP2A, PATBM, forum anak kab klaten, forum anak desa kajoran, forum kab. pekalongan, PIK-R, Forum PUSPA batang, forum puspa pekalongan, Bapas pekalongan, bapas batang, puspaga pekalongan, Puspaga, PPT Banyu putih, PPT LPPAR, P2TP2A Batang, forum ponpes darul hadlonah
		dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	rapat koordinasi dan sinkronisasi Provinsi Jumlah lembaga yg dikuatkan dan dikembangkan bagi anak yg	10.000.000	10 Kelompok	10 Kelompok	10.000.000	10.000.000	100	Dharma Wanita, Pilar PKBI, Forum anak, forum genre, forum OSIS, jurnalis perempuan, IBI, yayasan Elsa, WH Fatayat NU
6 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi			200.000.000	20%	20%	200.000.000	192.633.894	96,32	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	200.000.000	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	200.000.000	192.633.894	96,32	belum semua kabupaten/kota maupun OPD provinsi memenuhi keterisian data pilah secara keseluruhan pada indikator yang menjadi tanggung jawabnya dan keterisian datanya belum terverifikasi mandiri dengan baik.
7 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang			305.000.000	27,70	61,11%	305.000.000	304.442.264	99,82	sudah ada 21 kab/kota dan provinsi yang telah menyusun GDPK. Prov. Jateng, Cilacap, purbalingga, kebumen, wonosobo, klaten, sukoharjo, grobogan, blora, jepara, kab. semara kendal, pekalongan, pemalang, tegal, brebes, koi magelang, kota surakarta, kota salatiga, kota semarang, kota pekalongan, kota tegal. proses finalisasi: wonosobo, purworejo, pati
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang menyusun GDPK	305.000.000	10 Kab/Kota	22 Kab/Kota	305.000.000	304.442.264	99,82	14 Kabupaten/Kota belum menyusun GDPK 5 Pilar Advokasi di Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen GDPK 5 pilar.
	Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)			25.000.000	35	35	25.000.000	24.943.000	99,77	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	25.000.000	10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000	24.943.000	99,77	Cilacap, purbalingga, kebumen, wonosobo, klaten, sukoharjo, grobogan, blora, jepara, kab. semarang, kab kendal, kab. pekalongan, kab. pemalang, kab. tegal, ka brebes. kota magelang, kota surakarta, salatiga, kota semarang, kota pekalongan, kota tegal, prov. Jawa Tengah

0	1			267.000.000		1 1	267 000 000 1	266 020 575	00.00	1	
8 PROGRAM PEMBERDAYAA	IN			367.000.000	Ί.		367.000.000	366.920.575	99,98		
DAN PENINGKATAN	,										
KELUARGA SEJAHTERA (KS)										
			 		96,30	96,60					
					30,30	90,00					
	Persentase kelompok tribina yang										
	aktif melaporkan Kegiatan										
	Persentase UPPKA yang aktif				91	92,07					
	melaporkan kegiatan										
				192.000.000	21 540	21.540	192.000.000	191.985.222	00 00	macih kurangnya keterampilan dan metiyasi kade	r -peningkatan keterampilan dan motivasi kader tribina
				192.000.000	Kelompok	Kelompok	192.000.000	191.903.222	33,33	kelompok Tribina dalam membina kelompok	melalui Workshop Advokasi Peningkatan Kualitas Hidup
		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program								kegiatan	Lansia melalui Kelompok BKL
		Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Jumlah kelompok tribina yang aktif								- Sosialisasi Penurunan Angka Stunting dan AKI Melalui
		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									Kegiatan BKR, Sosialisasi Penurunan Angka Stunting
											Melalui Kelompok BKB,
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta		175.000.000	7,000	7.023	175.000.000	174.935.353	99,96	masih kurangnya kapasitas kader kelompok	-peningkatan pengembangan usaha kelompok UPPKA
		Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah			Kelompok	Kelompok				UPPKA dalam pemasaran, pengembangan produk	dengan workshop peningkatan kelembagaan dan usaha
		Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Jumlah Kelompok UPPKA yang aktif							usaha kelompok.	kelompok UPPKA
		Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Julian Kelompok OFFKA yang aktil								-bimbingan teknis penyusunan studi kelayakan kelompok UPPKA serta bimbingan teknis peningkatan kualitas produk
											dan jaringan usaha kelompok UPPKA.
		Keluarga									
	Persentase Keterisian indikator Indek	s		75.000.000	30%	30%	75.000.000	74.844.500			
	Pembangunan Keluarga di										
	kabupaten/kota										
				75 000 000	250/	250/	75.000.000	74.044.500	00.70		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta	Persentase ormas yang ditingkatkan	75.000.000	35%	35%	75.000.000	74.844.500	99,79		
		Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	kapasitasnya dalam ketahanan								
		Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui	pembangunan keluarga								
		Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan		4 225 700 000		1	1.235.780.000	1.234.224.133	00.07		
9 PROGRAM PEMBINAAN	_,			1.235.780.000	'		1.235./80.000	1.234.224.133	99,87		
KELUARGA BERENCANA (K	в)										
					30%	30,38%				- angka perkawinan meningkat sehingga	penggerakan KB masif oleh PLKB, PPKB dan Sub
					30%	30,36%				mendorong peningkatan jumlah PUS	PPKBD
										- Kurangnya pemahaman dan kesadaran	
										masyarakat untuk mengikuti program KB -	
	Persentase pengguna kontrasepsi									Tidak semua kab/kota mau mengklaim UH	
	jangka panjang (MKJP)									akseptor dan kader yang IUD, karena lebih memilih menggunakan anggaran BOKB.	
										memini menggunakan anggaran bokb.	
	Unmeetneed KB				12,76%	8,60%					
				1.155.780.000	4.901.017	4.651.697	1.155.780.000	1.154.441.433	99,88	terbatasnya sarana prasarana atau akses ke	melakukan pelayanan KB terutama KB MKJP secara turun
		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan			orang	orang				pelayanan KB yang memadai terutama di lokasi	langsung ke masyarakat dan pendekatan/penyadaran KIE
		dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,								terpencil dan pendataan terkait KB dan	tentang KB ke masyarakat melalui PPKBD dan pendataan
		Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Jumlah peserta KB Aktif							Kependudukan belum tervalidasi dengan baik karena keterbatasan SDM penginput data di desa.	terkait KB dan Kependudukan dilakukan secara berjenjang dan tervalidasi dengan tepat waktu didukung SDM terlatih.
		Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai								narcha keterbatasan som penginput data di desa.	dan tervandasi dengan tepat waktu didukung SDM teriatin.
		Kearifan Budaya Lokal									
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta		80.000.000	17,50%	57,88%	80.000.000	79.782.700	99,73	<u> </u>	
		Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Persentase peran aktif PPKBD (Petugas		'				, .		
		Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan	Pembantu KB Desa) dalam pembinaan								
		Pembinaan Kesertaan Ber- KB	kesertaan berKB								
						1			•	1	1

Keterangan:

- 1. Mohon dapat melengkapi evaluasi capaian program/kegiatan Tahun 2023
- 2. Kolom Keterangan **(kolom 11)** diisi dengan kendala dan penjelasan jika realisasi tidak sesuai target, & hal^² lain yg perlu dijelaskan
- 3. Kolom Keterangan (kolom 12) diisi dengan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi kendala/ketidaksesuaian realisasi dengan target